

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF POST-TRANSITION MANAGEMENT POST
REPORT BY PROVINCIAL GOVERNMENT
(CASE STUDY AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 19 AND STATE SENIOR HIGH
SCHOOL 20 SURABAYA)**

Sri Roekminiati

Faculty of Administration, Dr. Soetomo
Email: sri.roekminiati@unitomo.ac.id

Chistiana Astuti

Faculty of Administration, Dr. Soetomo
Email: christiana.astuti@unitomo.ac.id

Sri Kamariyah

Faculty of Administration, Dr. Soetomo
Email: sri.kamariyah@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Precisely As of January 2017, Senior High School / Senior Vocational School officially managed the province. Naming Online Reports become an e-report card. Online report cards can be accessed by guardians and students wherever located. While the online report card still can not be accessed publicly. Accessible only by teacher, admin / operator. Match Evaluation Research Results: The e-Rapor Policy is appropriate and feasible to maintain. The e-Rapor policy does not require a new policy as a replacement. Evaluation of Effectiveness: Facilitate the incorporation of scores, chart student scores and also counseling guidance and connect with DAPODIK Center. Service Performance B or Satisfactory, Evaluation Efficiency: Input issued with the output / output of e-report cards is comparable. Effect of e-Rapor is efficient. Meta Evaluation: This e-Rapor evaluation is performed by Provincial School Trustees professionally per semester Evaluation result e - Reports into school considerations in taking policy. Factors That Become Constraints: The e-Rapor application often updates the system. Have not yet adjusted the e-Rapor Application with the revised 2013 curriculum. Technically e-Rapor application is classified as heavy application.4) Limit Description KIKD 60 characters. Suggestions and recommendations: For School Parties: Continue to upgrade server and speed in order to increase e-Rapor access. For Kemendikbud: The application of e-Rapor is technically not a heavy application. 3) No Limitations of 60 characters for KIKD description. In the future e-Rapor can be accessed by parents.

Keywords: Evaluation, Implementation, e-Rapor

1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan tentang perencanaan nasional yang menjadi pedoman atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi, kabupaten/ kota sebagai daerah otonom. Dalam rangka standardisasi itulah, maka Mendiknas menerbitkan Kepmen No. 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang

pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Jawa Timur untuk meningkatkan layanan pendidikan antara lain: PPDB Online, Klinik Kurikulum, 15 Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS), Seleksi Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, *Try Out Online*, Sahabat Dispendik, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, Aplikasi Gaji Online, P2KGS, dan Rapor Online.

Di antara berbagai layanan pendidikan yang saat ini populer adalah Rapor online. Rapor online merupakan jawaban untuk melakukan percepatan dan meminimalisir kesalahan dalam penulisan rapor. Rapor online ini dapat memudahkan wali murid untuk melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kemudian banyak kejadian dimana rapor siswa ada yang hilang, rusak, terbakar dan lain-lain. Sehingga, dibutuhkanlah cara yang efektif dan efisien agar rapor ini bisa diakses sewaktu-waktu dan kapanpun karena disimpan dalam sistem online. Tentunya terdapat hasil dan dampak secara nyata yang dapat dihasilkan dengan adanya rapor online ini, yaitu masyarakat lebih puas karena rapor online dapat diakses kapan saja, memberi pelajaran pada masyarakat Surabaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sehingga terbentuk Kota Surabaya *Cyber City*, dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Program *online* dalam pengisian rapor siswa bertujuan untuk mempermudah tugas guru dan wali kelas. Disamping efektif, efisien dan relatif mudah, sistem *online* juga terintegrasi, sehingga pihak terkait termasuk orangtua dapat mengetahui perkembangan belajar anaknya. sistem *online* juga dapat memberi rasa aman dan mengurangi tanggung jawab guru, wali kelas hingga sekolah. Data nilai akan tersimpan otomatis dalam server data pusat. Rapor online ini juga bisa mengurangi tingkat kecurangan dalam

mengontrol nilai siswa. rapor online ini para orang tua dapat dengan mudah mengakses rapor anaknya. Rapor online ini bisa diakses orang tua dengan memasukkan nomor Induk Kependudukan anaknya yang bisa dilihat dari surat keluarga. Karena rapor online ini sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Metode pengisian rapor online sendiri masih terkoneksi dengan internet (*online*) melalui website profil sekolah.dispendik.surabaya.go.id/rapor (berubah domain menjadi www.raporku.net). Rapor Online dapat diakses oleh wali murid dengan menggunakan NIK serta *password* yang telah diberikan oleh sekolah dimana peserta didik menuntut ilmu, sedangkan para guru dapat mengakses rapor online dengan memasukkan NIP dan *password*.

Seiring berjalannya waktu rapor *online* yang masih belum sempurna dalam pelaksanaannya ada kebijakan baru yaitu pengalihan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi. Tepatnya Per Januari 2017, SMA/SMK resmi dikelola provinsi. Kebijakan ini mengacu pada amanah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pengelolaan pendidikan SMA dan SMK dialihkan menjadi perangkat provinsi. Sebelumnya SMA dan SMK dikelola Pemkab/Pemko setempat sesuai UU Otonomi Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan guru di setiap provinsi. Penamaan Rapor *Online* menjadi *e-Rapor*. Sebanyak 22 SMA Negeri di Surabaya sudah sepakat menggunakan *e- rapor* yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang menjadi permasalahan tersendiri adalah di Kota Surabaya sebelum adanya *e-Rapor* sudah ada aplikasi rapor *Online* yang sudah diterapkan sejak tahun 2014. Rapor Online sudah bisa diakses oleh wali murid maupun siswa dimanapun berada. Sedangkan rapor online masih belum bisa diakses secara publik. Hanya bisa diakses oleh guru, admin/operator. Di Kota Surabaya khususnya justru mengalami kemunduran

karena awal mula orang tua diberi kemudahan untuk mengevaluasi belajar putra putrinya setiap saat, dimanapun dan kapanpun.

Kendala lain, aplikasi yang baru menimbulkan implikasi yang baru dikeranakan keterbatasan kemampuan, waktu, masalah teknis, dan sebagainya dari seorang guru untuk mengerjakan aplikasi ini seringkali menimbulkan sebuah fenomena unik yaitu munculnya “super hero”/ tenaga bantuan yang dengan sabar dan setia membantu guru-guru yang mengalami kesulitan tersebut. Permasalahan lain yang muncul kenyataan yang ada sekarang banyak aplikasi untuk menyusun laporan capaian kompetensi tetapi tidak dapat disinkronkan dengan Dapodik sehingga satuan pendidikan harus input ulang data nilainya ke Dapodik.

Tapi terlepas dari itu semua, pada dasarnya semua pihak harus siap untuk melaksanakan program *e-Rapor* ini dengan baik. Implikasi dari hal iniyang positif adalah timbulnya semangat belajar bagi para guru untuk dapat menguasai IT. Tanpa disadari oleh para guru mereka telah mengimplementasikan *Discovery learning, Problem Based Learning, Project Based Learning* dan *Life Long Education*, guru pun perlu belajar.

Bertolak dari deskripsi di atas peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana implementasi *e-Rapor* SMA di Surabaya khususnya SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20. Peneliti merangkumnya dalam judul peneliti sebagai berikut: **Evaluasi pelaksanaan E-Rapor Pasca Peralihan Pengelolaan Oleh Pemerintah Provinsi (Studi Kasus di SMA Negeri 19 dan SMA 20 Surabaya)**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan *e-Rapor* di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya Pasca Peralihan Pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi
- 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi user (guru, wali kelas, BK) dan sekolah

akan pelaksanaan *e-Rapor* di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya .

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diorientasikan pada upaya untuk menjawab atau memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan penelitian. Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, suatu organisasi/komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

A. Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive* sampling adalah:

Beberapa informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan yang peneliti wawancarai ini kemudian disebut sebagai informan kunci.

Informan yang ditentukan dengan cara ini adalah:

- (1) Supratman S,Pd selaku Kepala Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 19 Surabaya
- (2) Pipin Riyanto, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Kurikulum sekaligus Guru Biologi SMA Negeri 20 Surabaya
- (3) M.Novi Oke I Bagus Putra Selaku Bagian IT di SMA Negeri 19 Surabaya
- (4) Wiwik Yuliati, S.Kom selaku TU Kepegawaian sekaligus sebagai sinkronisasi data DAPODIK di SMA Negeri 19 Negeri Surabaya

Secara Kebetulan (*accidental*), Informan yang ditentukan dengan cara ini adalah orang tua wali murid SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya

- (1) 25 Orang tua wali murid SMA Negeri 19 Surabaya

- (2) 25 Orang tua wali murid SMA Negeri 20 Surabaya

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 19 Surabaya dan SMA Negeri 20 Surabaya. Peneliti mengambil lokasi ini selain karena SMA Negeri ini sudah menyelenggarakan pelayanan *e rapor* juga termasuk sekolah kawasan

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penyelenggaraan penelitian ini, proses pengumpulan data merupakan tahapan penting yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kerja keras dari penulis. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen

Penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data, yakni: observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumenter.

1) Observasi atau pengamatan

Dalam penelitian ini teknik pengamatan yang dipakai adalah pengamatan tidak terlibat/*non-participant observation*.

2) Wawancara Mendalam/*In-Depth interview* menurut Bungin (2007:108). adalah sama

seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Wawancara mendalam dilakukan utamanya pada wali murid kelas XI. Penelitian ini juga melakukan wawancara/diskusi terhadap para informan, yang dilakukan melalui media : (i) *Focused Group Discussion* (FGD); (ii) wawancara tatap muka.

3) Kuesioner menurut Sugiyono (2008:199) “ Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner ini diedarkan kepada wali murid di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya

4) Metode Dokumenter menurut Bungin (2007:121) adalah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan fokus penelitian sebagai wahana untuk

No	Tipe Evaluasi	Pengujian Dasar
1	Evaluasi Kecocokan	1)Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? 2)Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? 3)Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut : pemerintah atau sektor swasta ?
2	Evaluasi Efektivitas	1)Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ? 2)Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? 3)Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ?
3	Evaluasi Efisiensi	1)Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya ? 2)Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut ?
4	Evaluasi Meta	1)Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah profesional ? 2)Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? 3)Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

membatasi studi, dan pada dasarnya penelitian kualitatif tidak mulai dari suatu yang kosong (*blank*), akan tetapi dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap adanya suatu permasalahan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan *e-Rapor* di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya. Dengan menggunakan teori Finance dalam Badjuri (2002:136-138) yang terdiri ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan *e-Rapor*. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan evaluasi meta (*meta-evaluations*). Yang dari empat tipe evaluasi ini dapat dituangkan dalam pertanyaan berikut ini:

E. Metode Analisis Data

Peneliti melakukan analisis kualitatif Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Analisa Data Kualitatif (2009:20) terdiri tiga alur kegiatan yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian dan analisis data; dan 3) Menarik kesimpulan dan verifikasi/interpretasi. Ketiga tahap ini jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar serta merupakan proses siklus dan interaktif. Implementasi ini juga akan menjaring berbagai data primer dan sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan program *e-Rapor* di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang disebut “relevan”, “valid”, dan “reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 8 (delapan) unsur dikarenakan unsur yang ke-7 (tujuh) perilaku pelaksana dalam pelayanan rapor online ini tidak bisa diukur dikarenakan masyarakat (wali murid) tidak dapat bertatap muka langsung dengan guru pada saat mengakses evaluasi belajar siswa melalui internet. Sehingga unsur pelayanan yang dipakai untuk mengukur layanan rapor *online* hanya ada 8 (delapan).

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Badjuri & Yuwono (2002) mengemukakan bahwa tahapan yang cukup penting dan sering terlupakan efektivitasnya dalam kontes kebijakan publik Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Thomas Dye menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Wayne Parsons Hal:547). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan

publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan (Budi Winarno hal:229). Sehingga, evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran, dalam artian bahwa dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindarkan kesalahan yang telah dibuat di masa lalu.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

- 1) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- 2) Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
- 4) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono,1992) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang

semula direncanakan untuk merealisasikan suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan. Studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan (Sudiyono,1992) yaitu :

- 1) Pendekatan kepatuhan, asumsinya apabila para pelaksana mematuhi semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
- 2) Pendekatan perspektif, "*what's happening* (apa yang terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

- 1) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- 2) *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
- 3) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.

- 4) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

B. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- Evaluasi sebelum dilaksanakan (*evaluasi summative*),
- Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
- Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan atau evaluasi impak/pengaruh (*outcome*) kebijakan}.

Menurut Finance dalam Badjuri (2002:136-138) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan evaluasi meta (*meta-evaluations*).

Evaluasi kecocokan (*appropriateness*) menguji dan mengevaluasi tentang apakah

kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

Evaluasi efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya? Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan?

Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang

Tabel 1 Tipe Evaluasi Kebijakan

No	Tepe Evaluasi	Pengujian Dasar
1	Evaluasi Kecocokan	a. Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? b. Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini? c. Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut : pemerintah atau sektor swasta?
2	Evaluasi Efektivitas	a. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan? b. Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud? c. Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan?
3	Evaluasi Efisiensi	a. Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya? b. Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut?
4	Evaluasi Meta	a. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah profesional? b. Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan? c. Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial?

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:136-138)

sudah profesional ? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

Secara substansial, keempat tipe evaluasi ini, dapat disajikan dalam tabel 1 berikut ini :

Dari semua teori diatas, peneliti menggunakan teori yang digunakan adalah teori Finance dalam Badjuri (2002:136-138) yang terdiri ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan e-Rapor. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan evaluasi meta (*meta-evaluations*).

C. Kebijakan Dasar E-Rapor

Pengembangan aplikasi e-Rapor tersebut mengacu kepada:

1. Permendikbud No 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
3. Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Seluruh Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat pada Permendikbud tersebut telah tersedia dalam e-Rapor sehingga guru tidak perlu lagi memasukkan Kompetensi Dasar.
4. Panduan Penilaian yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015.

E-Rapor disusun agar data yang terdapat pada pengolahan penilaian di satuan pendidikan sama dengan data yang telah dikirim ke Dapodik sehingga satuan pendidikan tidak berlu bekerja dua kali untuk Input Data dan Nilai akhir yang diperoleh dapat langsung disinkronkan dengan data nilai di Dapodik. Kenyataan yang ada

sekarang banyak aplikasi untuk menyusun laporan capaian kompetensi tetapi tidak dapat disinkronkan dengan Dapodik sehingga satuan pendidikan harus input ulang data nilainya ke Dapodik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar dimulai dengan merencanakan penilaian, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah dan memanfaatkan, serta melaporkan hasil penilaian.

Proses penilaian hasil belajar peserta didik, baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan, akan lebih sistematis, komprehensif, lebih akurat, dan cepat dilakukan apabila didukung dengan perangkat aplikasi komputer. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan aplikasi e-Rapor untuk SMP yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk panduan penggunaannya. (<http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/erapor> ,diakses 7 Mei 2018)

III.4 EVALUASI PELAKSANAAN E RAPOR DI SMA NEGERI 19 DAN SMA 20 SURABAYA

Berikut adalah Deskripsi bagaimana pelayanan e rapor dengan menggunakan 4 Tipe Evaluasi di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 di Surabaya

D. Evaluasi Kecocokan

a. *e-Rapor* yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan

Kebijakan *e-Rapor* yang merupakan kebijakan pusat yaitu kebijakan dari Kemendikbud yang disusun oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah cocok dan layak untuk dipertahankan. Selama 2 (dua) semester ini tidak menemukan kendala berarti. Bahkan jika server belum *IP Public* bisa diinput dalam bentuk *Excel*, selanjutnya di sekolah bisa diimpor data nilainya. Tidak bisa dipungkiri memang masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan disana-sini. Antara lain aplikasi yang berat, pengisian KIKD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dibatasi hanya 60 (enam puluh) karakter. Pernyataan di atas sesuai dengan petikan wawancara dengan Ka kurikulum, guru dan operator di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 berikut ini:

Bapak Supratman, S.Pd, Ka Kurikulum SMA Negeri 20 Surabaya:

“.....selama ini peralihan dari Rapor Online dari Pemkot ke *E-Rapor* tidak menemui kendala berarti. Karena hampir mirip dengan rapor online aplikasinya hanya malah lebih sederhana *e- rapor*. Selain itu khan ada sosialisasi sebelum pemberlakuan *e-Rapor*. Jadi menurut saya *e-Rapor* layak untuk dipertahankan.....” (wawancara 4 Juni 2017)

Sedangkan Menurut Bapak Pipin Riyanto, S.Pd, M.Pd Ka Kurikulum SMA Negeri 19 Surabaya:

“.....begini *e-Rapor* itu khan kita download aplikasinya. Selanjutnya sekolah menyiapkan server yang *connect* dengan Dapodik. Guru bisa mengisi nilai dalam aplikasi itu baik di sekolah maupun di rumah karena kebetulan di SMA Negeri 19 sudah memiliki server yang sudah *IP Public*. Jadi jika ditanya layak atau tidak *e-Rapor* untuk dipertahankan....menurut saya bisa dipertahankan hanya perlu adanya penyempurnaan aplikasinya....untuk lebih detailnya yang tahu adalah operator..” (wawancara, Kamis 7 Juni 2018)

b. Kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan *e-Rapor* ini

Kebijakan *e-Rapor* yang masih berumur jagung, wajar masih banyak kekurangan yang terkadang sering dilakukan perubahan dalam aplikasinya dan terkadang membuat para guru *shock* awalnya. Tapi masih bisa diatasi dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari pusat selanjutnya *cluster* ke sekolah-sekolah di tingkat Provinsi. Di Surabaya sudah 22 (Dua puluh dua) sekolah SMA menggunakan aplikasi *e-Rapor*. Menurut berbagai sumber yang penulis wawancarai tidak memerlukan kebijakan baru sebagai pengganti, tapi hanya menyempurnakan aplikasinya saja.

c. Pelaksana kebijakan *e-Rapor* tersebut : pemerintah atau sektor swasta

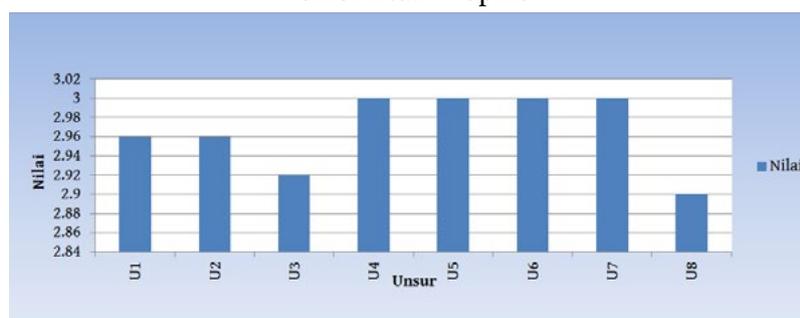
Pelaksana *e- Rapor* di Surabaya untuk sekolah Negeri adalah semua sekolah sebanyak 22 SMA Negeri dan 10 SMK Negeri. Untuk Swasta yang memang sudah mampu dan memiliki perangkat dipersilakan untuk menggunakan *e-Rapor* tapi belum diwajibkan.

E. Evaluasi Efektivitas

a. *e-Rapor* tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan

Kebijakan *e-Rapor* memiliki dampak yang sangat berarti bagi guru, wali kelas dan Guru BK. Memudahkan dalam memasukkan nilai, memetakan nilai siswa dan juga melakukan bimbingan konseling. Tetapi masih belum menyentuh *user* lain dari rapor itu sendiri yaitu wali murid. Karena rapor itu sendiri adalah hasil belajar yang wajib diketahui oleh orang tua siswa. Jika dibandingkan dengan *Rapor Online* sedikit mengalami kemunduran. Karena ketika *Rapor Online* yang aplikasinya dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah bisa diakses oleh orang tua dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, lewat hp android maupun laptop. Sedang *e-Rapor* masih belum bisa diakses oleh orang tua. Mungkin ke depannya *e-Rapor* juga bisa diakses oleh orang tua. Karena kebijakan *e-Rapor* masih

Grafik 1 : Nilai Per Unsur Pelayanan *E-Rapor* di SMA Negeri 19 Surabaya Pasca Pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi



Sumber: Data diolah

Grafik 2 : Nilai Per Unsur Pelayanan rapor di SMA Negeri 20 Surabaya Pasca pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi



Sumber: Data diolah

2 (dua) semester berjalan tentunya masih dalam proses penyempurnaan. Meskipun tidak bisa dipungkiri ketika rapor *online* sudah bisa diakses wali murid banyak orang tua yang masih *gaptek*, pasrah pada anaknya atau saudara untuk melihat atau menunggu rapor yang sudah dicetak yang dibagikan sekolah setiap semester. Hanya beberapa orang tua yang melihat *rapor online* ketika kebetulan bekerja atau di rumah ada koneksi internet.

Berikut ini hasil kuesioner yang peneliti sebarakan ke 25 wali murid terkait dengan layanan rapor pasca peralihan dari *rapor online* yang sebelumnya nilai bisa dipantau oleh wali murid menjadi *e-Rapor* yang sewaktu-waktu ortu tidak bisa memantau perkembangan putra-putrinya dari nilai. Hal ini disebabkan sejak Januari 2017 SMA/SMK pengelolaannya diambil alih oleh Propinsi. Adapun kuesioner ini menyangkut 8 (delapan) unsur pertanyaan meliputi: 1) Persyaratan pelayanan rapor; 2) Prosedur pelayanan rapor; 3) Waktu pelayanan rapor; 4) Biaya

yang dikeluarkan untuk pengadaan rapor; 5) kemampuan guru dalam melayani rapor; 6) Rapor yang disajikan; 7) Kesanggupan guru memberikan pelayanan rapor sesuai standar; 8) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.

Jika dibuat matrik nilai rata-rata semua unsur pelayanan rapor pasca pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh propinsi dengan menggunakan aplikasi *e-Rapor* adalah:

Nilai Rata-Rata Semua Unsur Pelayanan <i>E-Rapor</i>	
SMA Negeri 19	SMA Negeri 20
2,97	2,98

Nilai rata-rata tersebut karena berada dikisaran interval SPM (Survei Pelayanan Minimal) 2,51 - 3,25 maka termasuk pada kinerja pelayanan B atau memuaskan. Untuk SMA Negeri 19 yang sebelumnya peneliti sudah melakukan penelitian ketika menggunakan Rapor *Online* hasilnya sama yaitu 2,98. Artinya berdasarkan hasil penelitian menurut wali murid baik menggunakan rapor *Online*

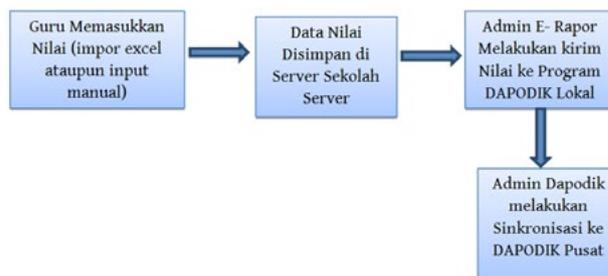
maupun pasca pengelolaan oleh Propinsi dengan menggunakan *e-Rapor* pelayanan rapor hasilnya sama yaitu kinerja pelayanan B atau memuaskan belum sangat memuaskan.

b. Tujuan *e-Rapor* yang dicapai dapat terwujud

Tujuan pengembangan *e-Rapor* SMA sebagai berikut: Membantu pendidik dalam mengolah nilai pengetahuan; Membantu pendidik dalam mengolah deskripsi pengetahuan; Membantu pendidik dalam mengolah nilai keterampilan; Membantu pendidik dalam mengolah deskripsi keterampilan; Membantu wali kelas dalam mengolah deskripsi sikap spiritual maupun sosial; Membantu Satuan pendidikan dalam menyusun laporan hasil penilaian sesuai dengan panduan penilaian dari Direktorat Pembinaan SMA.

Berdasar hasil wawancara dengan narasumber tujuan tersebut telah tercapai *e-Rapor* memudahkan para guru untuk memasukkan nilai. Dan juga Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dengan mudah, karena sudah tersedia kolom-kolomnya. Aplikasi lebih sederhana daripada rapor *online*. Untuk SMA Negeri 19 guru bisa mengisi nilai di rumah, sedangkan di SMA Negeri 20 karena belum menggunakan *IP Public* Guru bisa memasukkan nilai dalam bentuk *excel* ataupun *input* manual, selanjutnya data nilai disimpan di server sekolah, Admin *e-Rapor* melakukan kirim nilai ke program DAPODIK (Sistem Data Pokok Pendidikan) lokal selanjutnya Admin DAPODIK akan melakukan sinkronisasi data ke DAPODIK Pusat. Dapodik merupakan sistem pendataan berbasis web yang didalamnya termasuk data nilai siswa. Jika digambarkan alur masuknya nilai *e rapor* sebagai berikut:

Gambar 2 Alur Pengisian *E- Rapor*



Sumber : Hasil Wawancara M. Nofi Oke I Bagus Putra operator IT dan Wiwik Yulianti Admin Sinkronisasi DAPODIK Pusat, SMA Negeri 19 Surabaya (Kamis 7 Juni 2018)

c. Dampak *e-Rapor* sebanding dengan usaha yang telah dilakukan

Abad milenial ini sangat memengaruhi terhadap segala aspek baik dari segi ilmu sosial dan ilmu pendidikan, perubahan terus diwujudkan demi memodernisasi aspek-aspek kehidupan. Hedonisme manusia menumbuhkan kembangkan segala yang ada, dari manual diubah menjadi otomatis. Pergeseran ketenagaan juga merambak diubah dari manusia hingga ke mesin.

Dalam bidang pendidikan aspek ini memengaruhi dari segi penilaian, penghujung akhir semester biasanya ada pembukuan penilaian akhir. Rapor ditulis dengan tangan sudah ditinggalkan , zaman *now* rapor sudah menjadi *e-Rapor*. Terbayang betapa canggihnya jika kita memerlukan untuk melihat nilai tinggal ketik saja nama siswanya maka akan muncul.

Menurut pendapat para narasumber dampak *e-Rapor* apakah sebanding dengan usahanya? Sangat sebanding karena merupakan tuntutan atau kebutuhan zaman dan dunia pendidikan tidak boleh tertinggal justru seharusnya menjadipioner. Modernisasi menuntut seluruh sendi kehidupan termasuk pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Sekarang semua layanan serba elektronik. Baik layanan untuk pengisian SPT, Data Kependudukan, Pengurusan Ijin dan pelayanan publik lainnya sudah serba E- (elektronik). Dunia Pendidikan sudah diawali dengan PPDB *Online*, *Try Out Online*, Sahabat

Dispendik, Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online dan lain sebagainya.

F. Evaluasi Efisiensi

a. Input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output *e-Rapor*

Input dalam hal ini adalah sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapor online antara lain: SDM dalam hal ini operator/admin *e-Rapor*, sarana prasarana berupa *server*, *wifi* dan juga finansial untuk pembelian *server* dan juga biaya *wifi* per bulan. Luaran berupa rapor *online* yang sudah menjadi tuntutan teknologi informasi yang semakin canggih. Sudah tidak jamannya lagi rapor di tulis dengan tangan. Apalagi rapor yang disertai dengan deskripsi KIKD rasanya tidak bisa dihindari *e-Rapor* sudah menjadi keharusan. Selain itu karena data nilai ada sinkronisasi dan tersimpan di DAPODIK Pusat jika *server* di sekolah bermasalah misalnya berakibat fatal data hilang, data bisa diambil atau *download* lagi. Secara umum pendapat narasumber sudah sebanding antara *input* yang dikeluarkan dengan hasil/ *output e-Rapor*.

b. Cukup efisien dalam penggunaan keuangan sekolah untuk mencapai dampak *e-Rapor* tersebut

Dari narasumber yang peneliti wawancarai Penggunaan Keuangan sekolah untuk mencapai dampak *e-Rapor* cukup efisien karena menggunakan *server* tidak hanya untuk *e-Rapor* tapi juga untuk aplikasi CBT, Absen Murid, Absen Guru, dan web sekolah. Meskipun terkadang harus menggunakan 2 (dua) *server* seperti yang ada di SMA Negeri 19. Hanya untuk *e-Rapor* ini memang memerlukan jaringan internet yang kuat jadi *server*-nya harus bagus. Untuk *server* yang bagus harganya sekitar 15 – 25 juta, sedangkan biaya per bulan dengan dengan *speed* 40mb sekolah harus mengeluarkan biaya sebesar 5-7 juta/bulan. Jika *speed* 5-10mb bisa lebih murah apabila sekolah memiliki anggaran

yang terbatas. Untuk aplikasi *e-Rapor* sendiri bisa fleksibel karena jika anggaran sekolah terbatas untuk pengisian *e-Rapor* terpusat di sekolah saja. Data nilai bisa diisikan dari rumah dalam bentuk excel nanti di sekolah data diimpor. Seperti di SMA Negeri 20 pengisian *e-Rapor* di sekolah, sedangkan di SMA Negeri 19 guru bisa menggunakan aplikasi *e-Rapor* di rumah karena sudah *IP Public*. 2018)

G. Evaluasi Meta

a. Evaluasi *e-Rapor* yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah profesional Evaluasi *e-Rapor* ini dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah Provinsi. Biasanya dilakukan setiap semester ketika ulangan semester genap, semester ganjil. Terkadang juga hadir pada saat pertemuan-pertemuan pada acara tertentu *workshop* atau Bimtek. Tetapi evaluasi yang dilakukan tidak hanya tentang *e-Rapor* tetapi juga evaluasi keseluruhan mulai kurikulum, SDM, kesiswaan, PPDB, Ekskul, sarana prasarana dan lain sebagainya.

b. Evaluasi *e-Rapor* tersebut *sensitive* terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan.

Tidak bisa dipungkiri ada awalnya kehadiran aplikasi ini dirasa sebagai suatu beban baru yang merepotkan, guru dituntut “melek” teknologi informasi sebagai konsekuensi dari sebuah proses kemajuan. Perasaan resah dan gelisah tidak dipungkiri dialami oleh sebagian guru yang tidak mengenal *e-Rapor* sebelumnya. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi atau *In House Training* (IHT) atau Bimtek *e-Rapor* sudah bukan aplikasi yang asing. Karena di Surabaya khususnya sudah pernah mengenal rapor *online* jadi mudah untuk menyesuaikan. Awalnya pengenalan *e-Rapor* secara nasional di Jakarta, kemudian di Bogor, *share* ke sekolah secara kluster. SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 bergabung bersama untuk sosialisasi yang diselenggarakan di SMA

Negeri 5 Surabaya. Selanjutnya operator melakukan pelatihan di sekolah masing-masing. Di SMA Negeri 19 dilakukan pelatihan kepada seluruh guru dan admin selama 2 (dua) hari.

Selama 2 (dua) semester pemberlakuan *e-Rapor* sudah menjadi kebiasaan rutin per semester. Melek IT sudah menjadi budaya yang melekat. Tidak ada tekanan apalagi *shock*. Kebiasaan belajar bersama dengan sesama guru dan operator yang selalu siap membantu menambah kemudahan dan kelancaran dalam pengisian *e-Rapor*. *Server* yang bagus, jaringan internet yang kuat, pihak sekolah yang mendukung menyediakan sarana prasana apalagi bisa dikerjakan di rumah ketika waktu longgar akan menambah keleluasaan dalam menggunakan aplikasi *e-Rapor*.

- c. Evaluasi *e-Rapor* tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial

Hasil evaluasi *e-Rapor* akan menjadi pertimbangan selanjut sekolah dalam mengambil kebijakan. Misalnya di SMA Negeri 20 yang tadinya input nilai belum bisa dilakukan ke dalam aplikasi *e-Rapor* karena belum *IP Public* ke depannya pengisian *e-Rapor* bisa dilakukan guru di sekolah. Sehingga lebih efisien waktu. Tentunya semuanya disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki sekolah. Sehubungan evaluasi *e-Rapor* dilakukan oleh Pengawas Sekolah Propinsi dan sifatnya keseluruhan, menyangkut kurikulum, keuangan, sarana prasarana, kesiswaan, ekstrakurikuler dan lain sebagainya, maka tentunya perbaikan yang dilakukan sekolah tidak hanya aplikasi *e-Rapor* tapi juga yang lain. Untuk SMA Negeri 19 karena sudah *IP Public*, selanjutnya berharap *e-Rapor* bisa diakses wali murid khususnya yang orang tuanya berhalangan tidak bisa hadir karena alasan yang bersifat darurat.

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi User Dan Sekolah Dalam Pelaksanaan E-Rapor

Berikut ini adalah kendala yang dialami oleh user dan pihak sekolah dalam pelaksanaan *e-Rapor*:

- 1) Aplikasi *e-Rapor* sering melakukan *update* sistem.

Seringkalinya berubah sistem membuat kebingungan tersendiri bagi guru dan operator. Karena otomatis akan ada penyesuaian lagi dan perlu belajar lagi. Dan ini tentunya akan memakan waktu tersendiri. Karena pekerjaan guru banyak selain mengajar, juga mengikuti berbagai *workshop*, pemberkasan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Demikian juga operator tentunya harus sigap dan cerdas sebagai ujung tombak untuk memberikan solusi kepada guru jika ada permasalahan.

1. Menyesuaikan Aplikasi *e-Rapor* dengan kurikulum 2013 yang sudah revisi
Ini berlaku untuk tahun ajaran semester kemarin. Karena yang menggunakan kurikulum 2013 revisi hanya kelas X dan XI. Sedangkan kelas XII masih menggunakan kurikulum 2013 sebelum revisi. Ini menjadi kesulitan berarti.
2. Secara Teknis aplikasi *e-Rapor* tergolong aplikasi yang berat
Aplikasi yang berat tentunya memerlukan jaringan internet yang kuat. Mengingat tidak semua sekolah jaringan internetnya bagus sehingga sangat minim sekali penggunaan *e-Rapor* ini. Selain itu aplikasi yang berat memerlukan *server* yang bagus, implikasinya sekolah harus menyediakan dana lebih besar. *Server* yang bagus dengan sinyal yang kuat harga sekitar 20-30 juta. Dengan *speed* 40MB memerlukan biaya 5-7jt/per bulan. Tentunya ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tenaga IT masing-masing sekolah.
3. Pembatasan Deskripsi KIKD 60 karakter
Pembatasan KIKD 60 karakter menjadi kesulitan tersendiri bagi guru. Karena guru

tidak leluasa membuat deskripsi. Karena masing-masing anak dalam membuat Deskripsi KIKD masing-masing anak berbeda. Meskipun menurut operator jika KIKD tidak dibatasi 60 karakter ketika dicetak akan berantakan dan tidak bisa menjadi 1 (satu) lembar. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.

IV. PENUTUP

Penutup dalam penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan atas hasil penelitian yang telah disampaikan dalam pembahasan. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan terhadap Evaluasi Pelaksanaan *E-Rapor* Pasca Pengelolaan oleh Propinsi adalah sebagai berikut: .

- 1) Bagi pihak sekolah
Terus melakukan peningkatan *server* dan *speed* agar supaya daya akses *e-Rapor* semakin luas. Selain itu pernah jenuh untuk memotivasi para guru agar *melek* IT di segala usia. Selain itu menyiapkan operator komputer yang handal karena tempat bertanya dan problem solving terhadap permasalahan *e-Rapor* bagi guru ujung tombaknya adalah operator.
- 2) Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.
 - a) Diupayakan aplikasi *e-Rapor* secara teknis bukan aplikasi yang berat sehingga kinerja *server* juga tidak berat. Mengingat kemampuan sekolah dalam menyediakan *server* yang bagus dengan *speed* yang kuat belum tentu semua bisa memenuhi.
 - b) Diharapkan pada tahun ajaran ini (Semester Ganjil TA 2018/2019) sudah tidak ada masalah lagi, aplikasi *e-Rapor* sudah menyesuaikan kurikulum 2013 yang sudah revisi.
 - c) Update Sistem terlalu sering diharapkan dihindari agar tidak terjadi keresahan para guru

- d) Pembatasan 60 karakter untuk deskripsi KIKD diharapkan ditiadakan agar guru lebih leluasa dalam membuat deskripsi. Selain itu diupayakan dengan tidak ada pembatasan karakter waktu dicetak tidak ada kerusakan.
- e) Diharapkan ke depan *e-Rapor* bisa diakses oleh orang tua dimanapun, kapanpun. Orang tua memiliki keleluasaan untuk mengakses nilai rapor putra-putrinya hanya dengan memasukkan *username*, dan PIN. Karena bagaimanapun orang tua merupakan *user e-Rapor*.

- 3) Bagi Peneliti
Tindak lanjut dari penelitian ini adalah adanya upaya sekelompok dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada wali murid yang *gaptek* teknologi, dengan melakukan pembelajaran dalam mengakses internet khususnya akses untuk *e-Rapor* jika benar-benar *e-Rapor* sudah bisa diakses oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang
- Dunn, W. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Jogjakarta
- Dye, R. Thomas, 1987, *Understanding Public Policy*, Prentice - Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.

- Dunn, W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada Univercity Press, Jogjakarta. <http://www.tempo.co/read/> diakses tanggal 06 Maret tahun 2018.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung. http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997 diakses tanggal 11 Maret tahun 2018
- Islamy, Irfan M, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. <http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/erapor> ,diakses 7 Mei 2018
- Koentjoroningrat. 1991. *Metode-metode penelirian kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Laswell, harold D 1984 *politise, who, gets, what, when, how*. Dalam Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan kebijakan publik*. Bandung :API
- Moleong Lexy MA. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakrata : UI Press.
- Santoso, Purwo (et.al), Modul Pembelajaran *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010.
- Samodra, Wibawa., Yuyun Prabukusumo dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiyono. 1992. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program) Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fisipol*. UGM Yogyakarta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung.Pusat Bahasa Depdiknas
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumber lain :**
- <http://pewartaekbis.com/> diakses pada tanggal 05 Januari tahun 2018.
- <http://daerah.sindonews.com/> diakses tanggal 05 Mei tahun 2018